

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI

Arison Nainggolan

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
arisonainggolan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI. Dari pengujian yang dilakukan, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poluan dkk (2015). Kepemilikan manajerial yang paling signifikan adalah pada PT. Beton Jaya Manunggal Tbk sebesar 89,45% saham dikuasai oleh manajerial dengan tingkat pengungkapan 27,78%. Sementara itu, kepemilikan institusional ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniroh (2012). Kepemilikan Institusional yang paling signifikan adalah pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk dengan persentase 91,52% dan tingkat pengungkapan sebesar 39,23%. Kepemilikan publik ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan publik yang paling signifikan adalah pada PT Astra Internasional Tbk dengan persentase 49,85% dengan tingkat pengungkapan 51,32%. Variabel terakhir adalah komisaris independen. Ditemukan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poluan (2015). Persentase jumlah komisaris independen yang paling signifikan adalah PT. Budi Starch & Sweetener Tbk dengan persentase 66,66% dengan tingkat pengungkapan sebesar 39,74%.

Kata Kunci : *Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan Komisaris, Pengungkapan Sukarela*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan menjadi alat bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan. Melalui pengungkapan laporan keuangan dan laporan tahunan, manajemen memberikan gambaran pengelolaan perusahaan kepada pemilik perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan yang lain. Pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen erat kaitannya dengan pencapaian *good corporate governance* (GCG). Perusahaan-perusahaan go publik diupayakan untuk mengelola perusahaan dengan tata kelola yang baik diantaranya dengan pengungkapan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan informasi pemilik dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kenyataannya, dalam mengelola perusahaan, manajemen (agen) biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap/detail dibanding informasi yang dimiliki oleh pemilik (principal). Perbedaan ini disebabkan oleh rutinitas manajemen mengelola perusahaan, hari ke hari manajemen berurusan dengan pengelolaan operasional perusahaan. Berbeda halnya dengan pemilik (principal), pemilik hanya mengetahui sebahagian kecil dari kegiatan perusahaan. Pemilik mengetahui kondisi perusahaan hanya melalui pelaporan keuangan. Inilah yang menyebabkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara agen dan

principal. Sehingga kenyataan ini menjadi riskan bagi kepentingan pemilik. Untuk memenuhi tuntutan informasi bagi pemilik, maka perlu adanya pengungkapan atas pengelolaan perusahaan. Wolk, Tearney dan Dodd, 2001 dalam Suwardjono, 2005 mendefinisikan pengungkapan adalah *“broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communication including footnotes, post-statement events, management discussion and analysis of operations for the forthcoming year, financial and operating forecast and additional financial statements covering segmental disclosure and extensions beyond historical cost”*. Singkatnya pengungkapan itu tidak sebatas laporan keuangan saja, turut diungkapkan informasi-informasi pelengkap berupa catatan kaki, diskusi manajemen, analisis aktivitas yang akan datang, peramalan keuangan dan operasional dan informasi terkait lainnya. Berkaitan dengan penerapan GCG, Bacelius (2002); Herwidiatmo (2000) mengungkapkan bahwa penyebab lemahnya GCG di Indonesia adalah (1) minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan, (2) tidak efektifnya dewan komisaris sebagai organ pengawas terhadap aktivitas manajemen, (3) ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan dan (4) adanya konsentrasasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas dan direktur perusahaan. Dalam beberapa penelitian yang membahas variabel ini, struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris akan sangat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Li dan Qi (2008); Uyar (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan manajerial mempengaruhi luas pengungkapan sukarela serta komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan

sukarela. Dengan pencapaian GCG, pemenuhan informasi yang diperlukan oleh pemilik maupun pihak lainnya akan terpenuhi, pengungkapan merupakan faktor penting dalam membangun GCG. Berdasarkan penjelasan dan temuan-temuan diatas, peneliti menganggap bahwa judul ini “pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI” menarik untuk diteliti.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Agensi Teori

Agensi teori menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan sebagai sebuah kontrak (Jensen and Meckling, 1976). Pemilik perusahaan disebut sebagai principal dan pengelola perusahaan disebut sebagai agen yang ditugasi untuk kepentingan principal. Principal sebagai pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada agen sebagai manajer untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan principal sebagai pemilik. Pemisahan fungsi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan informasi (*asymmetric information*) yang akhirnya menyebabkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Agen yang sehari-hari mengelola perusahaan menguasai informasi perusahaan secara detail. Sementara principal hanya memiliki informasi yang sangat terbatas mengenai perusahaan. Keadaan ini menyebabkan agen sebagai manajer berkesempatan menggunakan asimetri informasi untuk kepentingan sendiri yaitu memperkaya diri sendiri. Perbedaan kepentingan ini menjadi riskan bagi pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu, agen dituntut untuk melakukan pengungkapan untuk meminimalisasi asimetri informasi dengan harapan penungkapan ini akan membantu para pengambil keputusan untuk memutuskan keputusan yang optimal bagi mereka.

2.2 Pengungkapan

Pengungkapan merupakan tindakan memberikan informasi kepada masyarakat. Wolk, Tearney dan Dodd, 2001 dalam Suwardjono, 2005 mendefinisikan pengungkapan adalah *“broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communication including footnotes, post-statement events, management discussion and analysis of operations for the forthcoming year, financial and operating forecast and additional financial statements covering segmental disclosure and extensions beyond historical cost”*. Singkatnya pengungkapan itu tidak sebatas melaporkan keuangan saja, turut diungkapkan informasi-informasi pelengkap berupa catatan kaki, diskusi manajemen, analisis aktivitas yang akan datang, peramalan keuangan dan operasional dan informasi keuangan terkait lainnya. Menurut Soewardjono dalam bukunya teori akuntansi (2005) pengungkapan dapat diwajibkan untuk beberapa tujuan. Pertama, tujuan melindungi (*protective*) yang dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih (*sophisticated*) sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos laporan keuangan. Kedua, tujuan informatif yang dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Tujuan yang kedua ini untuk membantu keefektifan pengambilan keputusan oleh pemakai. Ketiga tujuan kebutuhan khusus yang merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Menurut Suhardjanto (2012) terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Suwardjono (2005)

menyatakan bahwa pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, pengungkapan yang telah diatur secara ketat oleh aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat aturan atau standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Sementara pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas pasar modal (BAPEPAM).

2.3 Hubungan Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dikuasai oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase pemilikan saham yang dikuasai oleh manajemen terhadap jumlah saham beredar. Kepemilikan manajerial dinilai dapat menyelaraskan kepentingan principal dengan kepentingan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajerial, hal ini akan mempengaruhi manajemen untuk bertindak layaknya sebagai pemilik (principal) dan akan melakukan praktek pengelolaan perusahaan dengan lebih baik salah satu praktek yang dilakukan adalah pengungkapan sukarela. Penelitian Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Struktur Kepemilikan Managerial Mempengaruhi Signifikan Pengungkapan Sukarela

2.4 Hubungan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan institusional adalah porsi kepemilikan saham yang dikuasai oleh lembaga seperti bank, asuransi atau institusi lain (Beiner et al, 2003). Persentasi kepemilikan saham yang dikuasai oleh institusi diukur dengan membandingkan porsi saham yang dikuasai oleh institusi terhadap jumlah saham beredar. Kepemilikan saham yang

dikuasai institusi akan banyak mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan, termasuk pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajemen (Boediono, 2005).

Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Struktur Kepemilikan Institusional Mempengaruhi Signifikan Pengungkapan Sukarela

2.5 Hubungan Struktur Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan publik diartikan sebagai kepemilikan saham yang dikuasai oleh masyarakat. Semakin besar kepemilikan saham yang dikuasai oleh publik, maka tuntutan pengungkapan informasi keuangan yang lengkap akan semakin tinggi (Choi, 2010).

Dari uraian diatas diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Struktur Kepemilikan Institusional Mempengaruhi Signifikan Pengungkapan Sukarela

2.6 Hubungan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi dengan internal perusahaan. Menurut Sutedi (2012) tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi. Berkaitan dengan peran dewan komisaris, Kenneth (2010) berpendapat bahwa peran pengawasan dewan komisaris akan melemah jika komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas dan apabila pengaruh direksi yang terlalu kuat. Untuk mengukur persentasi komisaris independen dilakukan dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh komisaris.

H4 : Komisaris Independen mempengaruhi signifikan pengungkapan sukarela

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian konfirmatoris (*confirmatory research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dengan pengujian hipotesis yang dilandasi oleh teori-teori yang sudah ada (Hair et al, 2013 dalam Sholihin, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode penelitian kuantitatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah go publik di bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur pada tahun 2015-2016 yang memenuhi criteria penelitian (*purposive sampling*). Adapun sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria adalah :

1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2016
2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap untuk tahun 2015-2016
3. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang memiliki data-data yang terkait dengan variabel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang mencakup struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris dan pengungkapan. Laporan tahunan ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti akan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kewajaran dan karakteristik data-data yang digunakan serta menjelaskan penyebaran variabel-variabel penelitian dengan melihat nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji regresi linear berganda, terlebih dahulu harus memenuhi beberapa criteria pengujian. Criteria pengujian regresi linear berganda harus memenuhi criteria normalitas, multikolinearitas, heteroskedastis dan autokorelasi. Untuk memenuhinya maka harus dilakukan pengujian criteria-kriteria tersebut.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian terhadap model regresi. Bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Bila hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai diatas tingkat signifikansi 0,05 maka data berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam sebuah model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Apabila terjadi korelasi antar variabel independen, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen, dapat melihat nilai *tolerance* atau VIF (*Variance Inflation Factor*). Sebuah model regresi yang bebas multikolinearitas memiliki nilai $VIF < 10$ dan mempunyai angka

$tolerance > 0,1$ atau mendekati 1 (Ghozali, 2009).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2009). Jika terdapat kesamaan varian disebut homoskedastis, jika terjadi ketidaksamaan varian disebut heteroskedastis. Dampak dari heteroskedastis adalah varian koefisien regresi cenderung lebih besar yang menyebabkan uji hipotesis menjadi tidak akurat dan interpretasi hasil yang diambil menjadi tidak tepat. Oleh Karena itu, model yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastis dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Apabila hasil pengujian lebih besar dari sig 0,05 maka tidak terjadi herteroskedastisitas, sebaliknya apabila hasil pengujian signifikansi $< 0,05$ maka terdapat gejala heteroskedastis.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada pengamatan periode t dengan pengamatan pada periode t-1 (Ghozali, 2009). Apabila terdapat korelasi, maka disebut dengan autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yaitu melihat nilai d statistik dengan tingkat signifikansi 0,05. Model regresi yang bebas autokorelasi apabila nilai koefisien durbin-watson terletak diantara du dan 4-du.

Tabel 3.1
Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Hipotesis	Jika	Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif	$0 < d_w < d_l$	Tolak
Tidak ada autokorelasi positif	$d_l \leq d_w \leq d_u$	No decision
Tidak ada korelasi negative	$4 - d_l < d_w < 4$	Tolak
Tidak ada korelasi negative	$4 - d_u \leq d_w \leq 4 - d_l$	No decision
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	$d_u < d_w < 4 - d_u$	Tidak tolak

Keterangan : d_l = batas bawah d ; d_u = batas atas d

3.4.3 Model Regresi

Analisis regresi mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Seberapa besar ketergantungan variabel dependen terhadap variabel independen atau dengan kata lain, seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen (Ghozali, 2009). Model regresi berganda digambarkan dengan sebuah persamaan regresi berganda. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional domestic, kepemilikan publik dan komisaris independen. Sementara yang menjadi variabel dependen adalah pengungkapan sukarela. Dari variabel-variabel diatas maka persamaan regresi berganda menjadi seperti berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Variabel dependen
- a : Konstanta
- b_1, b_2, b_3, b_4 : Nilai Koefisien Regresi
- X_1, X_2, X_3, X_4 : Variabel Independen
- e : error

3.5 Definisi Operasional

3.5.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menunjukkan proporsi saham yang kuasai/dimiliki oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan persentase kepemilikan manajerial seperti dibawah ini :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

KM = kepemilikan manajerial

3.5.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dikuasai/dimiliki oleh institusi atau lembaga (pemerintah, perusahaan asuransi, bank dan institusi lainnya). Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan persentasi pemilikan institusional sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

KI = Kepemilikan Institusional

3.5.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dikuasai oleh masyarakat umum. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan persentasi pemilikan yang dikuasai oleh publik. Persentasi ini dihitung dengan menggunakan formula berikut :

$$KP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki publik}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

KP = Kepemilikan Publik

3.5.4 Komisaris Independen

Komisaris independen berperan penting dalam perusahaan. Salah satu fungsi komisaris independen adalah fungsi pengawasan dan mengusahakan pencapaian *good corporate governance*. Proporsi komisaris independen akan memperkuat posisi independensi dewan komisaris dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel ini peneliti menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris seperti berikut ini :

$$\text{KomIndep} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

KomIndep : Komisaris Independen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data-data yang digunakan serta menjelaskan

penyebaran variabel-variabel penelitian dengan melihat nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Dibawah ini disajikan tabel statistik deskriptif dari 130 sampel data.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev
KM	0.00	0.89	0.2401	0.3417
KI	0.02	0.92	0.6503	0.2475
KP	0.08	0.50	0.2698	0.1138
KomIndep	0.23	0.67	0.4108	0.1002
Disclo	0.09	0.51	0.3201	0.0962

Sumber : SPSS

Dari tabel statistik deskriptif diatas, terlihat bahwa tingkat pengungkapan rata-rata yang dilakukan sebanyak 0,3201 atau 32,01% . Pengungkapan maksimum yang dilakukan sebesar 0, 51 atau 51% oleh PT Astra Internasional Tbk dan perusahaan dengan pengungkapan minimum sebesar 0,0897 atau 9% adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Dalam hal kepemilikan manajerial, KM minimum adalah 0,00 artinya tidak terdapat kepemilikan manajerial. Sementara KM maksimum sebesar 0,8945 atau 89,45% yaitu PT . Betonjaya Manunggal Tbk. Kepemilikan publik yang paling maksimum adalah 0,4986 atau 50% yaitu PT. Astra Internasional Tbk. Sementara KP yang paling minimum adalah 0,0859 atau 9,59% adalah PT. Betonjaya Manunggal Tbk. Komisaris Independen yang paling banyak jumlahnya adalah 0,6660 atau 67% pada PT Budi Starch & Sweetener Tbk. Sementara KomIndep yang paling sedikit jumlahnya adalah 0,23 atau 23,3 % pada PT. Polychem Indonesia Tbk dan beberapa perusahaan lain.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan Signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai diatas tingkat signifikansi 0,05 ini artinya bahwa data sudah berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) kurang dari 10 sementara nilai tolerance lebih dari 0,1. Ini berarti data bebas dari multikolinearitas. Sementara uji heteroskedastisitas juga menunjukkan nilai

signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05. Ini artinya data bebas dari heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik terakhir adalah uji autokorelasi dengan nilai DW 2,117. Nilai DW lebih besar dari batas atas du yakni 1,579 dan kurang dari 4-du = 2,421 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 4.2
Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Indikator		
	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	
		.389	
		.998	
Multikolinearitas	Variabel	Tolerance	VIF
	KM	.410	2.440
	KI	.758	1.320
	KP	.782	1.278
	KomIndep	.420	2.381
Heteroskedastis	Variabel	Sig	
	KM	.491	
	KI	.398	
	KP	.519	
	KomIndep	.372	
Autokorelasi	Durbin watson	1.988	

Sumber : SPSS

4.3 Analisis Hasil Regresi

Pengujian criteria statistik meliputi uji koefisien determinasi Adjusted R², uji signifikansi model (F-statistik), dan uji signifikansi variabel (t-statistik)

1. Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R²*

Koefisien Determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R²* dalam model ini adalah 0,397 yang artinya bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 39,7%. Sisanya sebesar 60.3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 4.3
Ajusted R²

R	R square	Adjusted R ²	Std. Error of the estimate
0,785	0,616	0.397	0.0644

Sumber : Data Diolah 2017

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji-F memperlihatkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai uji-F sebesar 6,534 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ini berarti model dapat digunakan secara bersama-sama memprediksi tingkat pengungkapan sukarela. Jadi variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan

publik dan komisaris independen) secara simultan mempengaruhi variabel tingkat pengungkapan sukarela.

Tabel 4.4

Uji F

Model	F	Sig.
Regression	6,534	0,000

Sumber : Data Diolah 2017

3. Uji Signifikansi Variabel/Partial (Uji Statistik t)

Uji signifikansi variabel atau disebut uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 0,05. Hipotesis diterima bila nilai sig. lebih kecil dari 0,05. Tabel dibawah ini menggambarkan hasil uji statistik t (uji-t)

Tabel 4.5

Uji t

Variabel	Koefisien	t	Sig.
KM	-0,035	-0,452	0,638
KI	0,164	2,143	0,044
KP	0,253	4,547	0,014
KomIndep	0,176	2,214	0,025

Sumber : Data Diolah 2017

Hasil uji variabel kepemilikan managerial (KM) memiliki nilai sig. sebesar 0.638. Nilai signifikansi 0,638 >0,05, artinya bahwa secara parsial variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sementara variabel KI memiliki sig. 0.044 < 0.05, artinya secara parsial KI berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan publik memiliki nilai sig. 0.014 < 0.05 artinya secara parsial KP berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Variabel Komisaris Independen memiliki nilai sig. 0.025 < 0.05 artinya variabel KomIndep berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

4. KESIMPULAN

Dari pengujian yang dilakukan, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poluan dkk (2015). Kepemilikan managerial yang paling signifikan adalah pada PT. Beton Jaya Manunggal Tbk sebesar 89,45% saham dikuasai oleh managerial. Tingkat pengungkapan 27,78%. Sementara itu, kepemilikan institusional ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniroh (2012). Kepemilikan Institusional yang paling signifikan adalah pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk dengan persentase 91,52% dan tingkat pengungkapan sebesar 39,23%. Kepemilikan publik ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan publik yang paling signifikan adalah pada PT Astra Internasional Tbk dengan persentase 49,85% dengan tingkat pengungkapan 51,32%. Variabel terakhir adalah komisaris independen. Ditemukan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poluan (2015). Persentase jumlah komisaris independen yang paling signifikan adalah PT. Budi Starch & Sweetener Tbk dengan persentase 66,66%

Daftar Pustaka

- Aniroh, Sulung. 2012. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI.
- Bacellius, Ruru. 2002. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Lingkungan BUMN. Disampaikan dalam rapat kordinasi BUMN 17-18 April
- Boediono, G. S.B. 2005. *Kualitas Laba: Studi Empiris pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo

- Choi, Frederick D.S dan Gary K. Meek. 2010. *International Accounting*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Penerbit Universitas Diponegoro
- Herwidiyatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia. Majalah Usahawan, Oktober No.10/Th.XXIX
- Jensen. M.C., & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, V.3 No.4, 205-360
- Kenneth, A.Kim. 2010. *Corporate Governance*. US America: Peason Education, Inc.
- Li, H and Qi, A. 2008. Impact of Corporate Governance on Voluntary Disclosure in Chinese Listed Company. *Corporate Ownership and Control* 5(2) : 360-366
- Poluan, Godeliva dkk. 2015. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan. *4th Economics and Business Research Festival*
- Sholihin, Mahfud dkk. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0. Andi Publisher
- Suhardjanto, Djoko dan Erna Rahmawati. 2012. *Peran Board of Directors dalam Operational Risk Disclosure* (Jurnal). Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Trikonomika*: Vol.11 No.1 Juni 2012, Hal.1-14.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta:Paragonatama Jaya.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi : Perakayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE Yogyakarta
- Uyar, A and Bayyurt, N. 2014. Association between Firm Characteristics and Corporate Voluntary Disclosure : Evidence from Turkish Listed Companies. *IC* 9(4) : 1080-111